

DRAMATURGI POLITIK DALAM PEMILIHAN PRESIDEN 2019



Dr. Deden Ramdan M.Si.
(Wakil Rektor III Unpas)

Pendahuluan

Pemilihan Legislatif dan Pemilihan presiden 2019 akan digelar serentak pada 17 April 2019. Rangkaian tahapan sudah dilakukan sejak Oktober 2017. Indonesia akan menjalani babak baru praktik demokrasi dengan penyelenggaraan Pemilu serentak 2019, yang terdiri dari pemilihan presiden dan wakil presiden digabung dengan pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Penulis mencoba mendeskripsikan persoalan yang dihadapi menjelang pemilihan presiden yang ditandai riuh rendahnya para pendukung calon pasangan calon presiden dalam *ngobobotahan* idolanya sedemikian rupa yang selain berpotensi menimbulkan kegaduhan yang luar biasa juga berdampak kepada pembelahan antarwarga secara diametral. Namun, di sisi lain ada hal yang menarik untuk diamati yaitu adanya peristiwa yang seolah didramatisasi untuk mengesankan

peristiwa yang menimbulkan kehebohan seperti: "Negeri ini akan tenggelam di tahun 2030"; "Akan terjadi kerusuhan secara massif jika penyelenggara pemilu gagal melaksanakan pilpres"; "Ada 7 kontainer dari negara lain yang berisikan jutaan surat suara yang telah dicoblos", misalnya.

Pembahasan

Untuk menjelaskan fenomena politik di atas, kita diingatkan pada penelitian Erving Goffman *The Presen-*

tational of Self in Everyday Life (1959) yang membicarakan tentang dramaturgi. Sekilas dramaturgi adalah sebuah sandiwara yang disajikan oleh kehidupan manusia.

Secara lengkap *Erving Goffman* memberi batasan bahwa dramaturgi adalah sandiwara kehidupan yang disajikan oleh manusia. Kita lihat kembali contoh di atas, bagaimana seorang polisi memilih perannya, juga seorang warga negara biasa memilih sendiri peran yang dinginkannya. Goffman menyebutnya sebagai bagian depan (*front*) dan bagian belakang (*back*). *Front* mencakup, *setting*, *personal front* (penampilan diri), *expressive equipment* (peralatan untuk mengekspresikan diri). Sedangkan bagian belakang adalah *the self*, yaitu semua kegiatan yang tersembunyi untuk melengkapi keberhasilan acting atau penampilan diri yang ada pada *Front*. Berbicara mengenai Dramaturgi *Erving Goffman*, maka kita tidak boleh luput untuk melihat *George Herbert Mead* dengan konsep *The Self*, yang sangat memengaruhi teori *Goffman*. Jadi, yang memerankan adalah manusia-manusia di sekitar kita. Karena itu, masing-masing manusia diperbolehkan memilih perannya. Kehidupan manusia penuh dengan panggung sandiwara yang lengkap dengan *setting* panggung dan akting individu sebagai aktor dalam kehidupan.

Sebagaimana umumnya sebuah lakon drama, *Goffman* menyebut ada rekayasa panggung. Misalnya, seseorang harus pandai memerankan dirinya di bagian depan (*front stage*) dan

bagian belakang (*back stage*) dengan peran yang berbeda. Bagian depan itu mencakup *setting* dan *personal front* (penampilan diri). Sementara itu, bagian belakang berkaitan dengan *the self* yakni semua aktivitas tersembunyi untuk melengkapi keberhasilan akting atau penampilan diri yang ada di depan itu.

Bisa dikatakan, wilayah depan biasanya adalah wilayah individu bergaya dan formal. Mengapa? Karena mereka sedang memainkan perannya di panggung, sedangkan wilayah belakang biasanya merujuk pada tempat dan peristiwa yang memungkinkan mempersiapkan perannya di wilayah depan. Jadi, wilayah belakang akan ikut mendukung peran depan apa yang akan dimainkan. Tentu saja, peran depan itu hanya rekayasa semata.

Kita sekarang menganalogikan dengan sebuah panggung pertunjukan. Panggung depan biasanya panggung terlembagakan yang mewakili kepentingan kelompok/organisasi. Agar pertunjukan berlangsung dengan baik, seorang aktor perlu mengabaikan kepentingan dan karakter pribadi agar pertunjukan sesuai skenario. Sementara itu, pembuat skenario, tata rias menyiapkan semuanya. Kaum dramaturgis memandang manusia adalah aktor panggung metaforis yang sedang memainkan peran masing-masing.

Sebagaimana kehidupan ini, politik tidak lain juga sebuah panggung dengan banyak aktor yang terlibat. Dalam politik, seorang individu juga menampilkan *front stage* dan

back stage secara berbeda. Seseorang tentu akan menjadi lain dari sebenarnya setelah ia tampil menjadi politisi. Sebagai sebuah panggung politik juga penuh dengan skenario sesuai tujuan akhir lembaga politik. Perilaku individu akan dipengaruhi oleh peran dirinya di depan dengan didukung oleh aktor di belakang layar.

Sebagaimana panggung sandiwara, panggung politik depan tidak mencerminkan apa adanya seorang individu. Individu hanya melakoni tujuan skenario dari belakang panggung. Tidak heran pula jika seseorang yang sifat aslinya baik bisa berubah total setelah ia terlibat dalam politik (*front stage*). Panggunya memang menghendaki seperti itu. Bahkan bisa dikatakan, citra seseorang sering merupakan rekayasa tertentu agar kelihatan baik di mata orang lain.

Sekadar contoh sebut saja para politisi dari partai politik (Parpol) tertentu. Parpol adalah lembaga tempat seseorang memainkan *front stage*-nya berdasar keberadaan lembaga itu. Apa tujuan lakon skenario parpol? Tidak lain adalah usaha untuk mempertahankan dan merebut kekuasaan. Tidak heran jika politisi parpol penguasa akan membela kekuasaannya dengan berbagai macam cara, sementara parpol oposisi akan terlibat untuk merebut kekuasaan dengan berbagai macam cara pula. Kita bisa cermati tingkah politisi di tanah air.

Perjalanan bangsa Indonesia untuk menjadi negara demokrasi sudah dilalui beberapa era dan generasi, mulai dari orde lama, orde baru,

sampai saat ini masuk dalam era reformasi. Sejarah mencatat bahwa sejak Indonesia merdeka sampai saat ini sudah berganti sebanyak tujuh kali pergantian presiden. Dari masing-masing presiden yang pernah memimpin negeri ini, memiliki gaya kepemimpinan yang beragam. Tidaklah mudah mencari dan mendapatkan presiden yang memiliki jati diri bangsa Indonesia dalam mewujudkan negara demokratis yang sesuai dengan karakter dan kebudayaan kita. Namun yang harus difahami bahwa transisi bangsa kita dalam perjalanan menuju negara demokrasi yang ideal termasuk memilih presidennya telah melalui berbagai rintangan dan problematika yang tidak ringan. Oleh sebab itu yang diperlukan bangsa ini adalah sikap *fairness* objektif, bertanggung jawab atas pilihannya, tidak menggunakan cara dan pola destruktif seperti menghina, memfitnah, melakukan propaganda busuk, bahkan melakukan *character assassination* terhadap lawan politiknya, siap menerima kekalahan dan tidak menjadi tirani minoritas, serta kepada pemenang tidak kemudian mewujudkan dominasi mayoritas yang berpotensi sewenang-wenang menggunakan kekuasaan karena terlalu murah negara ini dipertaruhkan hanya untuk memenuhi syahwat kekuasaan belaka.

Mengapa kenyataan tersebut perlu disampaikan ke masyarakat luas? Pertama, agar masyarakat tidak terantuk batu kesekian kali untuk memilih elite politik di masa datang. Kedua, agar masyarakat tidak mudah tergiring

pada perilaku di luar kenyataan yang ada. Alasannya, sebagian besar perilaku elite politik hanya sebuah drama yang sedang diperankan dengan lakon politik. Ketiga, untuk menyindir elite politik bahwa perilakunya selama ini penuh dengan kesemuan saja. (Nurudin, 2018). Jadi, mereka sedang memainkan sebuah drama politik di *front stage* yang direkayasa dari *back stage*. Yang perlu diingatkan ke masyarakat kita adalah sebaiknya jangan ikut hanyut untuk terlibat dalam permainan dramaturgi politik itu. Masyarakat itu hanya menonton saja, meskipun berteriak di luar panggung posisinya tetap penonton. Peran utamanya ada pada pembuat skenario dan para aktor panggung.

Jika penonton tidak suka dengan peran aktor-aktor itu, suatu saat jika lakonnya sudah berubah tentu harus dibuat "cerita lain". Jika memang ceritanya bagus, layak didukung kembali. Semua akan tergantung penonton alias masyarakat. Jadi, dunia ini memang panggung sandiwara dengan cerita yang sudah ditetapkan. Sebaiknya masyarakat ikut menentukan pembuatan skenario itu dengan memilih aktor-aktor yang mewedahi kepentingan mereka karena merekalah pemilik kedaulatan panggung bernama Indonesia.

Fakta pertama, setiap perhelatan pesta demokrasi selalu diwarnai antusiasme masyarakat yang cukup mengembirakan. Lepas dari turunnya partisipasi dalam bilik suara, setiap momen pergantian pemimpin dari level nasional hingga kepala daerah

selalu menjadi buah bibir masyarakat perkotaan hingga pedesaan. Intinya, fenomena pergantian pemimpin, khususnya melalui mekanisme pemilihan langsung cukup menyita perhatian dan harapan khalayak umum akan masa mendatang yang lebih baik. Fakta lain yaitu terdapat siklus kekecewaan berulang-ulang dalam hati masyarakat terkait setiap pergantian pemimpin: merasa kecewa lagi. Silih bergantinya sosok pemimpin baru selalu membawa harapan baru dan kekecewaan baru dalam realitas selanjutnya setelah sang pemimpin terpilih.

Fakta tersebut menarik untuk dipahami dari sisi realitas panggung kekuasaan, di mana teori Dramaturgi yang sangat terkait erat hal yang bersifat simbolik. Perwujudan modal simbolik bisa dalam berbagai bentuk misalnya, kemampuan orasi, meyakinkan pemilih atas gagasan-gagasannya, terutama teori panggung ini mensyaratkan politisi untuk sadar kamera. Ulasan Dramaturgi lebih jauh lagi dapat dipahami sebagai "fatamorgana politik", di mana kondisi politik ditekan pada derajat serendah-rendahnya dan secara keseluruhan terserap habis ke dalam percaturan mekanisme citra dan tanda-tanda (Halim, 2014).

Di sisi lain, ibarat sebuah panggung pemetasan, penonton hanya akan sekadar menilai performa politisi dalam memainkan peran semata, tidak pada proses-proses dan taktis di belakang panggung. Realitas yang dikemukakan hanyalah sebatas teatrikal dalam batas-batas yang sah untuk dipertontonkan. Hal di atas mene-

gaskan akan terasa sangat sulit, atau mungkin mustahil, untuk bisa memecah kebuntuan-kebuntuan mengungkap peristiwa apa yang sebenarnya terjadi di balik panggung-panggung drama politik. Semua politisi masing-masing berebut predikat protagonis dan mengantagoniskan lawannya di atas panggung politik.

Indikasi di atas bisa dibaca melalui sebagian tokoh-tokoh politik mencoba mengungkapkan kebenaran terselebung yang jarang diketahui secara luas, atau bahkan sama sekali tidak diketahui oleh penonton. Sayangnya, meskipun seringkali seorang aktor politik berusaha tampil prima dengan menyuguhkan kebenaran tertentu tentang sebuah permasalahan, bisakah adegan tersebut terlepas dari unsur-unsur motif-motif tertentu dalam kerangka pembacaan teori panggung politik menjelang pemilihan presiden 2019 karena sesungguhnya pada akhirnya rakyatlah yang akan menilai tentang perilaku dari para kandidat apalagi di era demokrasi rakyat memiliki otoritas penuh untuk menilai sosok dari pasangan calon presiden ini.

Seperti yang disampaikan oleh Henry B Mayo (2011) bahwa demokrasi merupakan suatu sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Ini diperkuat oleh pernyataan beliau bahwa demo-

kraasi adalah rakyat sebagai penentu, pemegang kekuasaan, pembuat keputusan dan kebijakan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, serta pengontrol terhadap pelaksanaan kebijakannya baik yang dilakukan secara langsung oleh rakyat atau mewakilinya melalui lembaga perwakilan. Oleh karena itu negara menggunakan sistem demokrasi diselenggarakan, yang didasarkan pada kehendak dan kemauan rakyat mayoritas dan juga tidak mengesampingkan kaum minoritas.

Untuk itu, diperlukan karakter yang mumpuni dari para kandidat dalam memaknai fenomena dramaturgi ini melalui sikap dan tindakan yang menurut Tead, Terry, Hoyt (2003) yaitu di satu sisi dia harus mampu memainkan seni peran dalam memengaruhi orang lain (rakyat) supaya mau menerima dan memahami konsep, teori, visi dan ketika terpilih mampu mendorong, memotivasi, dan bekerjasama disertai dengan bimbingan dan arahan guna mencapai tujuan yang diinginkan oleh para pasangan calon presiden tersebut.

Penutup

Jadi dengan demikian diperlukan kehati-hatian dari para kandidat pasangan calon presiden 2019 untuk memainkan teori dramaturgi ini agar tidak kontraproduktif bagi yang bersangkutan maupun masa depan demokrasi Indonesia.

Pada saat yang sama ada tuntutan bagaimana media mainstream juga harus secara hati - hati dalam

memberitakan fenomena ini karena media ini bisa dijadikan fasilitas panggung resmi yang tersedia secara luas oleh para kandidat yang pada gilirannya akan menjadikan publik kebingungan karena dihadapkan pada tuntutan untuk menilai beragam varian informasi yang kebenarannya relatif diragukan tetapi disuguhkan oleh para politisi yang celakanya malah *diperbuas* oleh media sosial tertentu dengan kadar pertanggungjawabannya yang dipertanyakan.

Daftar Pustaka

- Somerset, Maggie, et.al.2001. "Dramaturgical Study of Meetings Between General Practitioners and Representative of Pharmaceutical Companies". dalam *British Medical Journal*, Vol. 323 i7327 p1481(4)
- Goffman, Erving.1959. *The Presentation of Self in Everyday Life*. New York. Doubleday Anchor: Garden City
- Aspling, Fredrik.2011. "The private and the public in online presentations of the self, A critical development of Goffman's dramaturgical perspective." Stockholm Universitet: Department of Sociology
- Heryawan, RMA. 1986. *Dramaturgi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Tead, Terry, Hoyt. (dalam Kartono 2003). *Beyond Leadership* (12 konsep kepemimpinan. Jakarta: PT Elek Media Komputindo
- Kartini, K.2004. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Perkasa
- Mayo, Henry B.1960. *An Introduction to Democratic Theory*. New York: Oxford University Press
- Gunawan S, Bondan.2000. *Apa Itu Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan



Keluarga Besar

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PASUNDAN**

Mengucapkan Selamat dan Sukses

**KEPADA
WISUDAWAN/WISUDAWATI SARJANA DAN PASCASARJANA
GELOMBANG II 2018-2019**

*Dekan
ttd*

Dr. Moch. Budiana, S.IP., M.Si.